

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Fitriani<sup>1\*</sup>, Dahliah Baharuddin<sup>2</sup>, Hukma Ratu Purnama<sup>3</sup>,  
Mappaujung Maknun<sup>4</sup>

[fitrianimunir16@gmail.com](mailto:fitrianimunir16@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [dahliah.dahliah@umi.ac.id](mailto:dahliah.dahliah@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [hukmaratu.purnama@umi.ac.id](mailto:hukmaratu.purnama@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[mappaujung.maknun@umi.ac.id](mailto:mappaujung.maknun@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Maros, untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Maros, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel penelitian yakni lima tahu terakhir dari tahun 2017-2021. Data penelitian berasal dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan sumber data yaitu data sekunder, Metode penelitian yang digunakan yaitu Uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji determinasi R<sup>2</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak Signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah kemudian secara parsial variabel Pendapatan Asli daerah X1 tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah. Secara parsial variabel Belanja Modal X2 tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pemerintah atau variabel Y.

**Kata Kunci:** *Belanja modal; Pendapatan asli daerah; Pengeluaran pemerintah*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari peran pemerintahannya sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebahagian di bantu oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan peraturan tersebut pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menggunakan sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing (Vinniy Siti Utari, 2021).

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Yohanes Aris Yulianto, 2011).

Pembangunan sumberdaya merupakan yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan besar sehingga menyebabkan belanja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Besarnya belanja daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah yang bersangkutan. Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap kota/kabupaten yang ada di Indonesia (Husna Wahyuni 2021).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi. Pengeluaran pemerintah berdasarkan pada permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah di kelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum peningkatan belanja pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum. Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan fungsi ekonomi. Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup: program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek (Nur Fadila Arsyad 2021).

Secara umum realisasi pendapatan asli daerah, belanja modal serta realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Maros.

**Tabel 1** Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Belanja Modal serta Realisasi Pengeluaran Pemerintah Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran Pemerintah (Rp)
2017	194.999.053.694,01	359.172.375.515,88	1.159.193.369.079,88
2018	219.844.779.862,41	409.968.607.935,00	1.235.723.155.782,33
2019	227.998.857.884,00	354.872.974.922,00	1.163.509.152.278,72
2020	219.096.914.071,44	369.026.103.780,10	1.308.803.179.366,03

2021	221.489.706.931,39	310.623.327.290,24	1.367.371.785.167,70
------	--------------------	--------------------	----------------------

*Sumber: data sekunder BAPENDA Maros 2017-2021*

Dari tabel diatas realisasi pendapatan dan pengeluaran atau belanja daerah pemerintah Kab Maros tahun 2017-2021 mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan, tidak menentunya pertumbuhan yang signifikan di tahun 2021 di sebabkan oleh menerunya pendapatan dari dana perimbangan khususnya komponen dana bagi hasil pajak di bandingkan tahun 2020. Kemudian Tidak menentunya pengeluaran atau belanja daerah di sebabkan terjadinya perubahan setiap pengeluaran atau belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Hal ini menjadi dasar peneliti untuk mengambil kabupaten Maros untuk mengambil secara langsung data peningkatan dan realisasi penggunaan anggaran daerah dan membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain dibidang ekonomi antara daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan cara menggali potensi yang dimiliki daerah. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

### **Teori pendapatan asli daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Penerimaan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di artikan sebagai uang yang masuk ke kas daerah, atau penerimaan yang didapat pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara garis besar sumber-sumber penerimaan atau cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan dana pada dasarnya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut: pajak, adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk; Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut;

Keuntungan dari perusahaan-perusahaan Negara. Penerimaan dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara; Pinjaman. Pinjaman ini bisa dapat berasal dari luar Negeri maupun dari dalam Negeri.

### **Teori Belanja Modal**

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang "Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal" menyatakan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila: Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### **Teori pengeluaran pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta untuk terjaminnya distribusi kekayaan yang adil. Semakin besar dan banyaknya kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Teori menangani pengeluaran pemerintah dapat di golongan menjadi dua:

### **Teori Mikro**

Pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang memengaruhinya barang publik. Intraksi antara permintaan dan

penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan dilaksanakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

### **Teori Peacock dan Wiseman**

Teori peacock dan wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Menurut teori Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang.

### **Metode Analisis**

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Maros, lokasi penelitian ini di pilih dengan pertimbangan bahwa kabupaten maros memiliki jumlah realisasi Pendapatan asli daerah dan belanja modal serta pengeluaran pemerintah yang tidak menentu kadang mengalami peningkatan kemudian terjadi penurunan sehingga menjadi alasan bagi peneliti menganggap perlu adanya penelitian tersebut. Adapun waktu pelaksanaan selama 3 bulan mulai bulan Juli – september 2022, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi yang bersangkutan. Sumber data sekunder yang dipergunakan adalah realisasi Pendapatan Pemerintah dan Pengeluaran atau Belanja Daerah tahun 2017-2021 dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAPENDA Kabupaten Maros.

Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data sekunder sehingga metode pengumpulannya dengan metode dokumentasi. metode dokumentasi adalah mencari data atau variabel, mengumpulkan dokumen - Dokumen yang sudah ada serta berhubungan dengan variabel penelitian, dengan tujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis dokumen- dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik dari buku, karya ilmiah seperti skripsi, artikel, jurnal, internet dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian

yang akan dilakukan. Dengan demikian langkah yang dilakukan adalah dengan cara mencatat seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Maros. Sampel Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Maros. kriteria yang di tetapkan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD) Dan Belanja Modal terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2017-2021.

## Hasil Penelitian

### Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2 Tabel Uji Regresi

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-384,176	646,208		-,595	,612
	Ln_X1	16,934	20,463	,504	,828	,495
	Ln_X2	-1,091	12,410	-,054	-,088	,938

a. Dependent Variable: Ln\_Y

Sumber : SPSS Versi 26 (Peneliti, 2022)

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$= -384,176 + 16,934x_1 - 1,091x_2 + e$$

Persamaan dapat diartikan sebagai berikut :

a. konstanta sebesar Rp. -384,176 menyatakan bahwa jika nilai variabel PAD dan Belanja Modal sama dengan 0, maka pengeluaran pemerintah mengalami penerunan sebesar Rp. -384,176.

b. koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 16,934 apabila terjadi penambahan sebesar Rp.1,- maka akan menambah pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 16,934

c. koefisien Belanja Modal sebesar -1,091 artinya apabila terjadi penambahan Rp. 1,- maka pengeluaran pemerintah berkurang sebesar Rp. -1,091.

### Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh suatu variable independen terhadap variable dependen. Dengan menggunakan hipotesis :

Tabel 3 Uji parsial (uji t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-384,176	646,208		-,595	,612

Ln_X1	16,934	20,463	,504	,828	,495
Ln_X2	-1,091	12,410	-,054	-,088	,938

**a. Dependent Variable: Ln\_Y**

Sumber : SPSS Versi 26 (Peneliti, 2022)

Hasil uji t pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan sebesar 0,495 hal ini menunjukan bahwa nilai pendapatan asli daerah > 0,05 artinya Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan hasil output di atas di ketahui t hitung variabel X1 0,828 kemudian nilai t tabel distribusi 4,3027. maka nilai thitung < ttabel (0,828 < 4,3027) yang maka H1 di terima artinya berpengaruh. Hasil uji t Belanja Modal dengan nilai signifikan sebesar 0,938 hal ini menunjukan bahwa nilai Belanja Modal > 0,05 artinya Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hasil output di ketahi t hitung variabel X2 - 0,088 kemudian nilai t tabel distribusi 4,3027. maka nilai thitung < ttabel (-0,088 < 4,3027) maka H2 di tolak artinya tidak berpengaruh.

**Uji Simultan (Uji F)**

**Tabel 4 Uji Simultan (uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,267	2	2,133	,353	,739 <sup>b</sup>
	Residual	12,102	2	6,051		

a. Dependent Variable: Ln\_Y

b. Predictors: (Constant), Ln\_X2, Ln\_X1

Sumber : SPSS Versi 26 (Peneliti, 2022)

Dari tabel Uji Simultan, Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) Terhadap pengeluaran Pemerintah (Y) adalah sebesar 0,739 > 0,05 yang artinya tidak signifikan dan nilai F hitung 0,353 < F tabel 19,000. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal tidak signifikan dan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Koefisien Determinasi** digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Tujuan menghitung koefisien determinansi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 5 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,511 <sup>a</sup>	,261	-,479	2,45987

a. Predictors: (Constant), Ln\_X2, Ln\_X1

Sumber : SPSS Versi 26 (Peneliti, 2022)

Hasil  $R^2$  pada tabel diatas menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,261 yang berarti 26,1%, sehingga dapat dijelaskan bahwa adanya hubungan yang cukup kuat terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten Maros dirpengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sedangkan 73,9%. Di pengaruhi variabel lainnya yang belum di teliti.

## Pembahasan

Dari hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap pengeluaran pemerintah adalah sebesar  $0,739 > 0,005$  dan nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah secara simultan.

### Pengaruh Pendapatan asli daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan penerimaan dari Dinas-dinas. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Maros priode 2017-2021. Seperti pada tabel uji parsial nilai signifikansi  $0,495 > 0,05$  sehingga dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan tergadap Pengeluaran Pemerintah namun berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah, Hasil ini menunjukkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami naik turun, tetapi sebaliknya pengeluaran pemerintah justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini tidak sejalan dengan dengan peneliti terdahulu yang ditulis Mansyur Rahma wati dan catur Martin fajar (2017) yang menujjukan pendapatan asli Daerah berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah secara Parsial. Kemudian penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang ditulis Nur fadilla Arsyad (2021) yang menujjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengeruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah.

### Pengaruh belanja Modal terhadap Pengeluaran Pemerintah

Perkembangan Belanja Modal di tahun 2017 mengalami peningkatan di tahun 2018 dan terjadi penurunan di tahun 2019 kemudiaan di tahun 2020 kembali meningkat dan terjadi penurunan di tahun 2021. Fakta yang mendukung penelitian ini dari belanja modal terhadap penegeluaran pemerintah kabupaten Maros. pembangunan sejak tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, pengembangan pasar tradisonal untuk para pedagang kecil, hingga membuat akses untuk menenmpuh wilayah yang satu sudah sangat mudah di lalui serta perbaikan jalan dengan kondisi rusak parah hingga kepelosok – pelosok sudah banyak yang terialisasikan, hal ini dapat memperbaiki kualitas infrastruktur jalan sehingga dapat memepermudah akses pemasaran barang dan jasa sehingga semakin mendorong pertumbuhan sektor

industri dan jasa antar wilayah kabupaten/kota. Hasil pengujian Hipotesis menunjukkan di tolaknya H<sub>2</sub> yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah di kabupaten Maros tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan belanja Modal gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan membutuhkan jangka waktu lebih dari satu tahun untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik disebabkan hasil pembangunan yang belum dimanfaatkan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Hani Hatimatunnisani & Alen Dereas Putri (2018) yang menyatakan bahwa Belanja Modal signifikan terhadap belanja daerah di kecamatan Sukasari Bandung.

### Simpulan dan Saran

Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah Namun Tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah tahun 2017-2021. Kemudian nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,261 yang berarti 26,1%, sehingga dapat dijelaskan bahwa adanya hubungan yang cukup kuat terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten Maros dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sedangkan 73,1%. Di pengaruhi variabel lainya yang belum di teliti. Hal ini menunjukkan nilai t hitung variabel X<sub>1</sub> 0,828 kemudian nilai t tabel distribusi 4.3027. maka nilai thitung < ttabel (0,817 < 4.3027) yang artinya H<sub>1</sub> di terima dalam artian berpengaruh positif. Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah tahun 2017-2021. Kemudian nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,261 yang berarti 26,1%, sehingga dapat dijelaskan bahwa adanya hubungan yang cukup kuat terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten Maros dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Sedangkan 73,1%. Di pengaruhi variabel lainya yang belum di teliti. Hal ini menunjukkan t hitung variabel X<sub>2</sub> - 0,108 kemudian nilai t tabel distribusi -4.3027. maka nilai thitung < ttabel (-0,088 < 4.3027) yang artinya H<sub>2</sub> di tolak, dalam artian tidak ada pengaruh belanja modal terhadap pengeluaran pemerintah.

Bersarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut: Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber PAD serta meningkatkan dana PAD agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan daerah, belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Maros, pajak daerah juga sebagai salah satu komponen PAD diharapkan menunjukkan peningkatan untuk setiap tahunnya agar pemerintah kabupaten Maros dapat mengelola sumber pajak dengan baik untuk kepentingan Banyak orang. pemerintah Kabupaten Maros juga diharapkan mampu mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya dana PAD dan Belanja Modal dengan baik untuk meningkatkan pembanguna dan pelayanan pemerintah Kabupaten Maros; Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah wilayah penelitian sehingga sampel yang di peroleh lebih banyak dan hasil lebih akurat. Serta variabel yang digunakan lebih lengkap dan bervariasi.



## Daftar Pustaka

- Arsyad, Nurfadillah. 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Kota Makassar. Skripsi
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Kabupaten Maros Dalam Angka 2022.
- Hatimatunnisani, Hani Dkk. 2018. Pengaruh belnaja modal terhadap belanja daerah di kecamatan sukasari bandung. Jurnal akuntansi Volume 4, Nomor 1.
- Husna, Hernimas Naufalia Dkk. 2020. analisis pengaruh pendapatan asli daerah, pengeluaran pemerintah, investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB. provinsi banten tahun 2014-2018. DINAMIC : Derectory Journal Of Ekonomi. Vol 2. No. 2.
- Rosadi, Dedi. 2016. Analisis Statistik Dengan R. Gadjah Mada University Press.
- Suparmoko, M. 2013. Keuangan Negara Dalam Teori & Praktek Edisi 6. BPFE Yogyakarta
- Semmaila, Baharuddin. 2009. EKONOMITRIKA DASAR; edisi. I., Cet. I. PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA.
- Supranto, J. 2016. statistik Teori & Aplikasi Edisi 8 Jilid 2. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Di Lengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. KENCANA PERDANA MEDIA GROUP
- Utary, Vinny Siti. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. JAMMI-Jurnal Akuntansi Vol II, Nomor 1.
- Wahyuningsi, Tri. 2022. Ekonomi Publik. PT Raja Grafindo Persada Depok.
- Wahyuni, Husna. 2021. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar.